



MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
DAN
MENTERI KEUANGAN

- Yth. 1. Para Menteri Kabinet Merah Putih;
2. Jaksa Agung Republik Indonesia;
3. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia;
4. Para Kepala Lembaga Pemerintah Non-Kementerian; dan
5. Para Pimpinan Sekretariat Lembaga Negara.

SURAT EDARAN BERSAMA
NOMOR 2 TAHUN 2025
NOMOR 1/MK/AG/2025
TENTANG
DAFTAR PROGRAM KEMENTERIAN/LEMBAGA

A. LATAR BELAKANG

Sehubungan dengan telah dibentuknya Kabinet Merah Putih Periode Pemerintahan 2024—2029 melalui Peraturan Presiden Nomor 139 Tahun 2024 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Kabinet Merah Putih Periode 2024—2029 dan Peraturan Presiden Nomor 140 Tahun 2024 tentang Organisasi Kementerian Negara, maka disusunlah Surat Edaran Bersama Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dan Menteri Keuangan Nomor 5 Tahun 2024 dan Nomor SE-2/MK.2/2024 tentang Daftar Program Kementerian/Lembaga. Seiring dengan pelaksanaannya, terdapat kebutuhan penyesuaian nomenklatur Program Kementerian/Lembaga dalam rangka penyelarasan informasi kinerja dengan tugas dan fungsi Kementerian/Lembaga sesuai amanat peraturan perundang-undangan.

Penyesuaian Program tersebut akan ditetapkan dengan memperbaharui lampiran dalam Surat Edaran Bersama Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dan Menteri Keuangan tentang Daftar Program Kementerian/Lembaga. Penyesuaian Program juga tetap mengacu pada Redesain Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud

Surat Edaran Bersama ini dimaksudkan untuk menetapkan Daftar Program Kementerian/Lembaga yang akan berlaku efektif sejak Tahun Anggaran 2026.

2. Tujuan

Surat Edaran Bersama ini bertujuan sebagai berikut:

- a. meningkatkan efektivitas pelaksanaan Program Pemerintah dengan menghindari tumpang tindih kewenangan untuk mencapai prioritas pembangunan nasional;
- b. meningkatkan integrasi, konvergensi, dan kolaborasi kegiatan pembangunan antar Kementerian/Lembaga untuk mendorong efektivitas pembangunan nasional; dan
- c. menyesuaikan Program Kementerian/Lembaga dengan struktur Kementerian/Lembaga untuk menjawab dinamika pembangunan nasional yang membutuhkan organisasi pemerintahan yang lebih lincah, responsif, efektif dan kolaboratif.

C. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
5. Peraturan Presiden Nomor 139 Tahun 2024 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Kabinet Merah Putih Periode 2024—2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 249); dan

6. Peraturan Presiden Nomor 140 Tahun 2024 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 250).

D. RUANG LINGKUP

Surat Edaran Bersama ini melingkup konsep dan definisi Program serta Daftar Program Kementerian/Lembaga.

E. ISI EDARAN

1. Surat Edaran Bersama ini memiliki konsep dan definisi Program sebagai berikut:
 - a. Konsepsi Program sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, bahwa Program merupakan instrumen kebijakan pembangunan yang dituangkan dalam dokumen perencanaan jangka menengah dan tahunan untuk selanjutnya menjadi bagian dari rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
 - b. Nomenklatur Program dapat digunakan oleh satu Kementerian/Lembaga untuk selanjutnya disebut sebagai Program Spesifik, atau digunakan oleh lebih dari satu Kementerian/Lembaga untuk selanjutnya disebut Program Lintas K/L. Rumusan Program sebagaimana dimaksud telah sesuai dengan definisi Program menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yaitu:
 - 1) Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah/lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 16;
 - 2) Program Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah sekumpulan rencana kerja suatu Kementerian/Lembaga atau Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 18;
 - 3) Program Lintas Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah sekumpulan rencana kerja beberapa Kementerian/Lembaga atau beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 19.
 - c. Dalam rangka meningkatkan konvergensi dan kolaborasi pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian/Lembaga yang saling berkaitan serta mengurangi tumpang tindih

- Program antar Kementerian/Lembaga, penetapan nomenklatur Program Kementerian/Lembaga dilakukan dengan mengutamakan penggunaan nomenklatur Program yang sudah berlaku sejak Tahun Anggaran 2025, baik yang bersifat spesifik maupun lintas.
2. Penyusunan dan penetapan Program dilaksanakan dengan dilandaskan pada acuan sebagai berikut:
 - a. Visi dan Misi Presiden melalui 8 (delapan) Misi (Asta Cita), 17 (tujuh belas) program prioritas, dan 8 (delapan) program hasil terbaik cepat (*quick wins*) sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) Tahun 2025—2029; dan
 - b. tugas dan fungsi Kementerian/Lembaga sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
 3. Daftar Program Kementerian/Lembaga tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Bersama ini.
 4. Daftar Program Kementerian/Lembaga sebagaimana dimaksud pada angka 3 digunakan sebagai dasar dalam:
 - a. penyusunan informasi kinerja Kementerian/Lembaga pada Rencana Kerja Kementerian/Lembaga (Renja K/L), Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA K/L) dan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) sejak Tahun Anggaran 2026;
 - b. perubahan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga (Renstra K/L) 2025—2029; dan
 - c. penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) sejak Tahun 2026.
 5. Daftar Program Kementerian/Lembaga yang sudah ditetapkan dalam Surat Edaran Bersama Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dan Menteri Keuangan Nomor 5 Tahun 2024 dan Nomor SE-2/MK.2/2024 tentang Daftar Program Kementerian/Lembaga dinyatakan tidak berlaku.

F. PENUTUP

Surat Edaran Bersama ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal Juni 2025

a.n. MENTERI PERENCANAAN
PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN NASIONAL
DEPUTI BIDANG PEMBIAYAAN
DAN INVESTASI PEMBANGUNAN,



PUTUT HARI SATYAKA

a.n. MENTERI KEUANGAN
DIREKTUR JENDERAL
ANGGARAN,



LUKY ALFIRMAN

LAMPIRAN
SURAT EDARAN BERSAMA
MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS DAN
MENTERI KEUANGAN
NOMOR 2 TAHUN 2025
NOMOR 1/MK/AG/2025
TENTANG
DAFTAR PROGRAM KEMENTERIAN/LEMBAGA

Kementerian/Lembaga	Lintas K/L	Spesifik	Nomenklatur Program
001 - MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT	v		Dukungan Manajemen
	v		Penyelenggaraan Lembaga Legislatif dan Alat Kelengkapan
002 - DEWAN PERWAKILAN RAKYAT	v		Dukungan Manajemen
	v		Penyelenggaraan Lembaga Legislatif dan Alat Kelengkapan
004 - BADAN PEMERIKSA KEUANGAN	v		Dukungan Manajemen
		v	Pemeriksaan Keuangan Negara
005 - MAHKAMAH AGUNG	v		Dukungan Manajemen
	v		Penegakan dan Pelayanan Hukum
006 - KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA	v		Dukungan Manajemen
	v		Penegakan dan Pelayanan Hukum
007 - SEKRETARIAT NEGARA	v		Dukungan Manajemen
		v	Penyelenggaraan Layanan Kepada Presiden dan Wakil Presiden
010 - KEMENTERIAN DALAM NEGERI	v		Dukungan Manajemen
		v	Pembinaan Kapasitas Pemerintahan Daerah dan Desa
		v	Tata Kelola Kependudukan
		v	Pembinaan Politik dan Pemerintahan Umum
011 - KEMENTERIAN LUAR NEGERI	v		Dukungan Manajemen

Kementerian/Lembaga	Lintas K/L	Spesifik	Nomenklatur Program
		v	Penegakan Kedaulatan serta Hukum dan Perjanjian Internasional
		v	Diplomasi dan Kerja sama Internasional
		v	Perlindungan WNI di Luar Negeri serta Pelayanan Publik
		v	Peran dan Kepemimpinan Indonesia di bidang Kerja sama Multilateral
012 - KEMENTERIAN PERTAHANAN	v		Dukungan Manajemen
		v	Kebijakan dan Regulasi Pertahanan
		v	Modernisasi Alutsista, Non Alutsista, dan Sarpras Pertahanan
		v	Pembinaan Sumber Daya Pertahanan
		v	Profesionalisme dan Kesejahteraan Prajurit
		v	Pelaksanaan Tugas TNI
		v	Riset, Industri, dan Pendidikan Tinggi Pertahanan
015 - KEMENTERIAN KEUANGAN	v		Dukungan Manajemen
		v	Kebijakan Fiskal
		v	Pengelolaan Belanja Negara
		v	Pengelolaan Penerimaan Negara
		v	Pengelolaan Perbendaharaan, Kekayaan Negara dan Risiko
018 - KEMENTERIAN PERTANIAN	v		Dukungan Manajemen
		v	Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas
	v		Nilai Tambah dan Daya Saing Industri
	v		Pendidikan dan Pelatihan Vokasi

Kementerian/Lembaga	Lintas K/L	Spesifik	Nomenklatur Program
019 - KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN	v		Dukungan Manajemen
	v		Nilai Tambah dan Daya Saing Industri
	v		Pendidikan dan Pelatihan Vokasi
020 - KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	v		Dukungan Manajemen
		v	Mitigasi dan Pelayanan Geologi
		v	Pertambangan Mineral dan Batubara
	v		Pendidikan dan Pelatihan Vokasi
		v	Energi dan Ketenagalistrikan
022 - KEMENTERIAN PERHUBUNGAN	v		Dukungan Manajemen
	v		Infrastruktur Konektivitas
	v		Pendidikan dan Pelatihan Vokasi
024 - KEMENTERIAN KESEHATAN	v		Dukungan Manajemen
		v	Pelayanan Kesehatan Primer
		v	Pelayanan Kesehatan Lanjutan
	v		Pendidikan dan Pelatihan Vokasi
		v	Sistem Ketahanan Kesehatan
		v	Sumber Daya Kesehatan
025 - KEMENTERIAN AGAMA	v		Dukungan Manajemen
	v		Kerukunan Umat dan Layanan Kehidupan Beragama
	v		Pendidikan Tinggi
	v		Kualitas Pengajaran dan Pembelajaran
	v		Wajib Belajar 13 Tahun
026 - KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN	v		Dukungan Manajemen
		v	Pembinaan Ketenagakerjaan
	v		Pendidikan dan Pelatihan Vokasi

Kementerian/Lembaga	Lintas K/L	Spesifik	Nomenklatur Program
027 - KEMENTERIAN SOSIAL	v		Dukungan Manajemen
		v	Perlindungan Sosial
032 - KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN	v		Dukungan Manajemen
	v		Pendidikan dan Pelatihan Vokasi
	v		Kualitas Lingkungan Hidup
		v	Pengelolaan Perikanan dan Kelautan
	v		Nilai Tambah dan Daya Saing Industri
035 - KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN	v		Dukungan Manajemen
	v		Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan
036 - KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN	v		Dukungan Manajemen
	v		Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan
041 - KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA	v		Dukungan Manajemen
		v	Pengembangan dan Pengawasan BUMN
047 - KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	v		Dukungan Manajemen
		v	Kesetaraan Gender, Perlindungan Perempuan dan Anak
048 - KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI	v		Dukungan Manajemen
	v		Kebijakan, Pembinaan Profesi, dan Tata Kelola ASN
050 - BADAN INTELIJEN NEGARA	v		Dukungan Manajemen
		v	Penyelidikan, Pengamanan, dan Penggalangan Keamanan Negara
051 - BADAN SIBER DAN NEGARA	v		Dukungan Manajemen
		v	Keamanan dan Ketahanan Siber dan Sandi Negara
054 - BADAN PUSAT STATISTIK	v		Dukungan Manajemen
		v	Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik

Kementerian/Lembaga	Lintas K/L	Spesifik	Nomenklatur Program
055 - KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL	v		Dukungan Manajemen
		v	Perencanaan Pembangunan Nasional
056 - KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL	v		Dukungan Manajemen
		v	Pengelolaan dan Pelayanan Pertanahan
		v	Penyelenggaraan Penataan Ruang
057 - PERPUSTAKAAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA	v		Dukungan Manajemen
		v	Perpustakaan dan Literasi
059 - KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN DIGITAL	v		Dukungan Manajemen
		v	Komunikasi Publik dan Media
		v	Pengembangan dan Penguatan Ekosistem dan Ruang Digital
		v	Pengembangan dan Penguatan Infrastruktur Digital
060 - KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA	v		Dukungan Manajemen
		v	Modernisasi Almatasus dan Sarana Prasarana Polri
		v	Profesionalisme SDM Polri
		v	Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat
		v	Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana
063 - BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN	v		Dukungan Manajemen
		v	Pengawasan Obat dan Makanan
064 - LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL	v		Dukungan Manajemen
		v	Pembinaan Ketahanan Nasional
065 - KEMENTERIAN INVESTASI DAN HILIRISASI/BADAN KOORDINASI PENANAMAN	v		Dukungan Manajemen
		v	Penanaman Modal dan

Kementerian/Lembaga	Lintas K/L	Spesifik	Nomenklatur Program
MODAL			Hilirisasi
066 - BADAN NARKOTIKA NASIONAL	v		Dukungan Manajemen
		v	Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN)
068 - KEMENTERIAN KEPENDUDUKAN DAN PEMBANGUNAN KELUARGA/BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL	v		Dukungan Manajemen
		v	Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana
074 - KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA	v		Dukungan Manajemen
	v		Pemajuan dan Penegakan HAM
075 - BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI DAN GEOFISIKA	v		Dukungan Manajemen
		v	Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika
076 - KOMISI PEMILIHAN UMUM	v		Dukungan Manajemen
	v		Penyelenggaraan Pemilihan Umum
077 - MAHKAMAH KONSTITUSI	v		Dukungan Manajemen
		v	Penanganan Perkara Konstitusi
078 - PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN	v		Dukungan Manajemen
		v	Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dan Pendanaan Terorisme
083 - BADAN INFORMASI GEOSPASIAL	v		Dukungan Manajemen
		v	Penyelenggaraan Informasi Geospasial
084 - BADAN STANDARDISASI NASIONAL	v		Dukungan Manajemen
		v	Standardisasi Nasional
085 - BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR	v		Dukungan Manajemen
	v		Riset dan Inovasi Ilmu

Kementerian/Lembaga	Lintas K/L	Spesifik	Nomenklatur Program
			Pengetahuan dan Teknologi
086 - LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA	v		Dukungan Manajemen
	v		Kebijakan, Pembinaan Profesi, dan Tata Kelola ASN
087 - ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA	v		Dukungan Manajemen
		v	Penyelenggaraan Kearsipan Nasional
088 - BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA	v		Dukungan Manajemen
	v		Kebijakan, Pembinaan Profesi, dan Tata Kelola ASN
089 - BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN	v		Dukungan Manajemen
		v	Pengawasan Pembangunan
090 - KEMENTERIAN PERDAGANGAN	v		Dukungan Manajemen
		v	Perdagangan Dalam Negeri
		v	Perdagangan Luar Negeri
092 - KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA	v		Dukungan Manajemen
		v	Keolahragaan
		v	Kepemudaan
093 - KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI	v		Dukungan Manajemen
		v	Pencegahan dan Penindakan Perkara Korupsi
095 - DEWAN PERWAKILAN DAERAH	v		Dukungan Manajemen
	v		Penyelenggaraan Lembaga Legislatif dan Alat Kelengkapan
100 - KOMISI YUDISIAL REPUBLIK INDONESIA	v		Dukungan Manajemen
		v	Penegakan Integritas Hakim
103 - BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA	v		Dukungan Manajemen
		v	Ketahanan Bencana
104 - KEMENTERIAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA/BADAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA	v		Dukungan Manajemen
		v	Penempatan, Pelindungan dan Pemberdayaan PMI

Kementerian/Lembaga	Lintas K/L	Spesifik	Nomenklatur Program
106 - LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH	v		Dukungan Manajemen
		v	Pengadaan Barang/Jasa Nasional
107 - BADAN SAR NASIONAL	v		Dukungan Manajemen
		v	Pencarian dan Pertolongan pada Kecelakaan dan Bencana
108 - KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA	v		Dukungan Manajemen
		v	Pengawasan Persaingan Usaha
110 - OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA	v		Dukungan Manajemen
		v	Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Publik
111 - BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN	v		Dukungan Manajemen
		v	Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan
112 - BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM	v		Dukungan Manajemen
	v		Pengembangan Kawasan Strategis
113 - BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN TERORISME	v		Dukungan Manajemen
		v	Penanggulangan Terorisme
115 - BADAN PENGAWAS PEMILU	v		Dukungan Manajemen
	v		Penyelenggaraan Pemilihan Umum
116 - LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA	v		Dukungan Manajemen
	v		Penyiaran Publik
117 - TELEVISI REPUBLIK INDONESIA	v		Dukungan Manajemen
	v		Penyiaran Publik
118 - BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG	v		Dukungan Manajemen
	v		Pengembangan Kawasan Strategis
119 - BADAN KEAMANAN LAUT	v		Dukungan Manajemen
		v	Keamanan dan Keselamatan di Wilayah Perairan Indonesia

Kementerian/Lembaga	Lintas K/L	Spesifik	Nomenklatur Program
			dan Wilayah Yurisdiksi Indonesia
122 - BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA	v		Dukungan Manajemen
		v	Pembinaan Ideologi Pancasila
123 - LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN	v		Dukungan Manajemen
	v		Penegakan dan Pelayanan Hukum
124 - BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL	v		Dukungan Manajemen
	v		Riset dan Inovasi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
125 - BADAN PANGAN NASIONAL	v		Dukungan Manajemen
	v		Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas
126 - OTORITA IBU KOTA NUSANTARA	v		Dukungan Manajemen
	v		Pengembangan Kawasan Strategis
127 - BADAN KARANTINA INDONESIA	v		Dukungan Manajemen
	v		Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas
128 - BADAN GIZI NASIONAL	v		Dukungan Manajemen
		v	Pemenuhan Gizi Nasional
129 - KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG POLITIK DAN KEAMANAN	v		Dukungan Manajemen
	v		Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan
130 - KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG HUKUM, HAK ASASI MANUSIA, IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN	v		Dukungan Manajemen
	v		Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan
131 - KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PANGAN	v		Dukungan Manajemen
	v		Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan
132 - KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG INFRASTRUKTUR DAN PEMBANGUNAN	v		Dukungan Manajemen
	v		Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan

Kementerian/Lembaga	Lintas K/L	Spesifik	Nomenklatur Program
KEWILAYAHAN			
134 - KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	v		Dukungan Manajemen
	v		Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan
135 - KEMENTERIAN HUKUM	v		Dukungan Manajemen
		v	Pembentukan Regulasi
	v		Penegakan dan Pelayanan Hukum
136 - KEMENTERIAN HAK ASASI MANUSIA	v		Dukungan Manajemen
	v		Pemajuan dan Penegakan HAM
137 - KEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN	v		Dukungan Manajemen
	v		Penegakan dan Pelayanan Hukum
138 - KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH	v		Dukungan Manajemen
	v		Wajib Belajar 13 Tahun
	v		Kualitas Pengajaran dan Pembelajaran
		v	Pembangunan Kebahasaan dan Kesastraan
	v		Pendidikan dan Pelatihan Vokasi
139 - KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI	v		Dukungan Manajemen
	v		Pendidikan Tinggi
	v		Pendidikan dan Pelatihan Vokasi
	v		Riset dan Inovasi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
140 - KEMENTERIAN KEBUDAYAAN	v		Dukungan Manajemen
		v	Pemajuan dan Pelestarian Kebudayaan
141 - BADAN PENYELENGGARA HAJI	v		Dukungan Manajemen
	v		Kerukunan Umat dan Layanan Kehidupan Beragama
142 - BADAN PENYELENGGARA	v		Dukungan Manajemen

Kementerian/Lembaga	Lintas K/L	Spesifik	Nomenklatur Program
JAMINAN PRODUK HALAL	v		Kerukunan Umat dan Layanan Kehidupan Beragama
143 - KEMENTERIAN KEHUTANAN	v		Dukungan Manajemen
		v	Pengelolaan Hutan Berkelanjutan
	v		Pendidikan dan Pelatihan Vokasi
144 - KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP/BADAN PENGENDALIAN LINGKUNGAN HIDUP	v		Dukungan Manajemen
	v		Kualitas Lingkungan Hidup
		v	Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim
	v		Pendidikan dan Pelatihan Vokasi
145 - KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM	v		Dukungan Manajemen
	v		Infrastruktur Konektivitas
		v	Ketahanan Sumber Daya Air
	v		Pendidikan dan Pelatihan Vokasi
	v		Perumahan dan Kawasan Permukiman
		v	Prasarana Strategis
146 - KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	v		Dukungan Manajemen
	v		Perumahan dan Kawasan Permukiman
147 - KEMENTERIAN PARIWISATA	v		Dukungan Manajemen
		v	Kepariwisata
	v		Pendidikan dan Pelatihan Vokasi
148 - KEMENTERIAN EKONOMI KREATIF/BADAN EKONOMI KREATIF	v		Dukungan Manajemen
		v	Ekonomi Kreatif
149 - KEMENTERIAN KOPERASI	v		Dukungan Manajemen
		v	Pengembangan Koperasi
150 - KEMENTERIAN USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH	v		Dukungan Manajemen
		v	Pengembangan Usaha Mikro,

Kementerian/Lembaga	Lintas K/L	Spesifik	Nomenklatur Program
			Kecil, Menengah, dan Kewirausahaan
151 - KEMENTERIAN DESA DAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL	v		Dukungan Manajemen
		v	Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal
152 - KEMENTERIAN TRANSMIGRASI	v		Dukungan Manajemen
		v	Transmigrasi

a.n. MENTERI PERENCANAAN
PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN NASIONAL
DEPUTI BIDANG PEMBIAYAAN
DAN INVESTASI PEMBANGUNAN,



PUTUT HARI SATYAKA

a.n. MENTERI KEUANGAN
DIREKTUR JENDERAL
ANGGARAN,



LUKY ALFIRMAN